



REPUBLIK
INDONESIA

PAS BESAR SEMENTARA

PROVISIONAL CERTIFICATE OF NATIONALITY

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 68 Permenhub Nomor PM 39 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah berdasarkan
Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : SE.1/DUPL/2020 Tahun 2020
Issued under the provision of Article 68 Minister of Transportation Regulation Number 39 Year 2017 and has been
amended based on a circular letter from the Director General of Sea Transportation Number SE.1/DUPL/2020 Year 2020

Nomor (Number) : AL520/2017/KSOP.PLG-2021

Yang bertanda tangan di bawah ini (The undersigned) KEPALA KANTOR KSOP KELAS II PALEMBANG / HARBOUR MASTER AND PORT
AUTHORITY OF PALEMBANG

Menyatakan bahwa (declares that) KAPAL PENGANGKUT PEKERJA / CREW BOAT

NAMA KAPAL NAME OF SHIP	TANDA PANGGILAN CALL SIGN	TEMPAT PENDAFTARAN PORT OF REGISTRY	TANDA PENDAFTARAN REGISTRATION MARK
ENC KALLIAPAT 3	—	—	—

UKURAN (P X L X D (METER)) DIMENSION (L x B x D (Meters))	TONASE KOTOR GROSS TONNAGE (GT)	TONASE BERSIH NET TONNAGE (NT)
12.00 X 3.40 X 1.60	14	5

PENGGERAK UTAMA MAIN PROPULSION	MERK DAN DAYA ENGINE MAKER AND POWER	BAHAN UTAMA KAPAL SHIP'S MATERIAL	NOMOR IMO IMO NUMBER
MESIN / ENGINE	YAMAHA 2 X 200 PK	FIBERGLASS / FIBERGLASS	—

TANGGAL PEMBANGUNAN DATE OF BUILD			
KONTRAK * CONTRACT	PELETAKAN LUNAS KEEL LAID	SERAH TERIMA * DELIVERY	PERUBAHAN * CONVERSION
02/01/2020	06/04/2020	22/06/2020	—

Milik (Owned by) PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA berkedudukan (at) JAKARTA UTARA memenuhi syarat sebagai kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu berhak berlayar mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.
has complied as an Indonesian vessel in accordance with the provisions of applicable regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan Perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.
To all authorities and officials of the Republic of Indonesia and all others to whom this may concern are therefore requested to give appropriate treatment to the master with his vessel and cargoes in accordance with the provisions stipulated in the laws of the Republic of Indonesia and the treaties concluded with other sovereign countries.

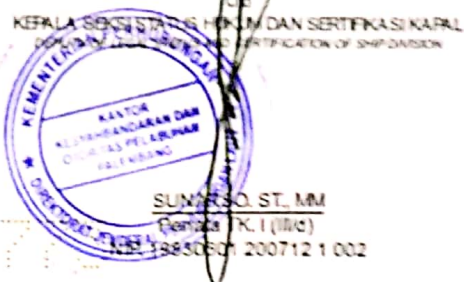
Berlaku sampai tanggal (Valid until):
03 NOVEMBER 2021

Diterbitkan di : PALEMBANG
Issued at
Pada Tanggal : 04/08/2021
Date

No. Urut Penerbitan : 140
Serial Number

* Jika Ada (If Available)

an. MENTERI PERHUBUNGAN
as. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
KEPALA KANTOR KSOP KELAS II PALEMBANG
HARBOUR MASTER AND PORT AUTHORITY OF PALEMBANG
KEPALA SEKTOR REGISTRASI HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL
CHIEF OF SECTOR OF REGISTRATION AND CERTIFICATION OF SHIP DIVISION



DIT. KAPPEL

6 042 76